

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Yang menyatakan bahwa teori keagenan muncul saat satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk suatu jasa dan kemudian mendeglarasikan wewenang pengambilan keputusan. Principal merupakan pemilik saham atau investor dari perusahaan tersebut sedangkan agen merupakan manajemen yang melakukan pengelolaan perusahaan. Sehingga hubungan keagenan yaitu untuk memisahkan fungsi dari kepemilikan saham atau investor dan juga pengendalian perusahaan oleh manajemen.

Pengertian teori agensi menurut Scott (2015) dalam Purba (2023) yaitu suatu pengembangan dari teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen (pihak manajemen) bekerja atas nama principal (investor). Teori agensi berisi hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu agen dan principal, dimana investor atau pemilik perusahaan menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atas nama pemilik perusahaan (Purba, 2023 : 24)

Menurut teori agensi, konflik antara agen dan principal terjadi karena setiap pihak hanya termotivasi oleh kepentingannya sendiri. Suatu konflik agensi terjadi ketika dua kepentingan dalam suatu perusahaan berbeda dan masing-masing berusaha mempertahankan keuntungan, yang sering menyebabkan masalah

keagenan. Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik agensi, manajemen bertanggung jawab kepada investor dengan mengungkapkan informasi perusahaan secara sukarela. Ada biaya agensi, seperti monitoring, proses audit, dan sistem kompensasi agen, ketika ada perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor. (Purba, 2023:29)

Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu jika dalam pengelolaan perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan efek negatif bagi perusahaan untuk kedepannya.

2.1.2 Akuntansi

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara dan nilai uang yang signifikan, transaksi dan peristiwa, yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya”.

Menurut Thomas (2013:1) bahwa:

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan”.

Menurut Warren (2017 :3) bahwa :

“Akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi Perusahaan”.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi merupakan aktivitas mencatat, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi suatu transaksi untuk menghasilkan laporan yang digunakan sebagai sistem informasi bagi pihak pemangku kepentingan.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Akuntansi

Tujuan akuntansi secara umum menurut Warren et all (2017) bahwa

“Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam mengambil keputusan, serta kebutuhan pengambilan keputusan pemangku kepentingan pihak eksternal maupun non-bisnis.”

Menurut Susilowati (2016 : 2) setiap sistem utama akuntansi akan melaksanakan lima fungsi utamanya yaitu:

1. “Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
3. Manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.
5. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas”.

2.1.2.3 Bidang Akuntansi

Menurut Rudianto (2019:9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. Akuntansi Manajemen, Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang fungsinya menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang berkaitan dengan operasi sehari-hari dan perencanaan

operasi masa depan. Misalnya, memberikan informasi biaya untuk menentukan harga jual produk tertentu dan pertimbangan terkait.

2. Akuntansi Keuangan adalah bidang akuntansi yang berfungsi melakukan seluruh proses akuntansi untuk membuat informasi keuangan bagi pemangku kepentingan eksternal. Informasi tersebut meliputi: laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca dan laporan selururh transaksi yang terjadi serta kondisi keuangan perusahaan untuk kepentingan pihak di luar perusahaan
3. Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang utamanya dalam proses pengendalian biaya dan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah memberikan informasi tentang biaya aktual dan rencana perusahaan
4. Auditing adalah bidang akuntansi yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan. Ketika audit dilakukan oleh karyawan perusahaan, itu disebut auditor internal . Hasil audit digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Jika audit akhir dilakukan oleh badan eksternal, disebut auditor independen atau akuntan publik
5. Akuntansi Sektor Publik adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan operasi organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan tidak menghasilkan keuntungan operasional, seperti perusahaan komersial lainnya. Contohnya adalah lembaga pemerintah, rumah sakit, dana sosial, panti jompo, dll.
6. Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang tugas utamanya membuat dan memeberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan untuk setiap operasi perusahaan. Lingkup pekerjaan di bidang ini bervariasi mulai dari kegiatan penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi perusahaan, hingga penghitungan surat pemberitahuan pajak (tax refund) yang menjadi hak perusahaan
7. Akuntansi Anggaran adalah cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana bisnis masa depan dengan menggunakan data aktual dari masa lalu. Selain penyusunan rencana kerja, cabang ini juga bertanggung jawab untuk memantau rencana kerja, yaitu mengarahkan segala upayanya untuk memastikan bahwa kegiatan sehari-hari perusahaan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
8. Sistem Akuntansi adalah bidang akuntansi yang berfokus pada kegiatan merancang dan menerapkan prosedur dan memelihara catatan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap kegiatan di bidang ini adalah untuk mengamankan aset perusahaan.

9. Akuntansi Internasional adalah bidang akuntansi yang memfokuskan pada masalah akuntansi yang berkaitan dengan operasi internasional (operasi lintas batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang termasuk dalam bidang ini adalah upaya untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016 : 3)

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1) menjelaskan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa

timbang balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2016:1) menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapresi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela (*taxes are enforced extractions, not voluntary contributions*), dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah. (Pohan, 2013 : 4)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa ada jasa timbal balik secara langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan masyarakat, yang iuran digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang dapat bermanfaat bagi rakyat seperti untuk pembuatan jalan, jembatan, gaji pegawai negeri, dan sebagainya.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat ditunjuk 9 Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji dan sebagainya.

2.1.3.2 Fungsi pajak

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguloir*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi
Fungsi ini terdapat lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi. Dalam fungsi redistribusi ini lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
4. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam membayar pajak.

Sedangkan Menurut Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara).
pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan

(PPH), Pajak 55 Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur).
pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.3.3 Pengelompokan pajak

Pengelompokan pajak ada tiga yang terdapat dalam buku Mardiasmo

(2011:5) yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - a). Pajak Provinsi,
contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b). Pajak Kabupaten/ Kota,
contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Tiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, antara lain:

- 1) *Official Assessment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutangya ditentukan oleh pemerintah (fiskus) dan akan muncul utang pajak apabila fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), sedangkan wajib pajak bersifat pasif.
- 2) *Self Assessment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya bersifat aktif yaitu harus menentukan sendiri besaran pajak terutangya, sedangkan fiskus tidak ikut campur namun hanya mengawasi proses pemungutan pajaknya.
- 3) *With Holding Assessment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besaran pajak terutangya ada pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak).

2.1.3.5 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2019:13) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. “Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapapun jumlah dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,00. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.
2. Tarif Proporsional (Sebanding)
Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh WP Badan dana Negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), dan sebagainya.
3. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh: pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan laba yang besar, sehingga manajemen perusahaan diuntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan, Berikut beberapa pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut :

Menurut (Sartono, 2012:122) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.”

Menurut Kasmir (2017:115) mendefinisikan bahwa

"Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”.

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

2.1.4.2 Tujuan Profitabilitas

Tujuan rasio Profitabilitas menurut Kasmir (2016:197)di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengukur laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan dari tahun ke tahun.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.3 Manfaat Profitabilitas

Manfaat rasio Profitabilitas menurut Kasmir (2016:198) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang akan diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan dari tahun ke tahun.
3. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman atau modal sendiri.

2.1.4.4 Metode pengukuran Profitabilitas

Laba sangat berpengaruh terhadap beban pajak, dimana semakin tinggi laba yang didapat maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut (Agus, 2012:113)terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Return On Assets (ROA)*,
2. *Return On Equity (ROE)*.
3. *Gross Profit Margin*
4. *Net Profit Margin*
5. *Operating Profit Margin*

Berdasarkan kelima rasio profitabilitas di atas, maka akan diuraikan mengenai kelima rasio tersebut, adalah sebagai berikut:

1. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini diitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return On Equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}}$$

3. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. *Gross Profit Margin* merupakan ukuran efisiensi perasi

perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga produk meningkat maka *Gross Profit Margin* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio *Gross Profit Margin*, maka akan semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan. Rumus perhitungan GPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

4. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. *Net Profit Margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

5. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan “*Pure Profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio operating profit margin, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur Profitabilitas yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), Dengan ROA kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Menurut Sartono (1998:130), “*Return on Investment* atau *Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.”

2.1.5 *Leverage*

2.1.5.1 Pengertian *Leverage*

Setiap perusahaan memerlukan sumber dana untuk menjalankan operasinya, sumber dana yang dibutuhkan biasanya terdapat dari modal sendiri atau dari pinjaman. Menggunakan modal dari pinjaman harus membayar bunga secara rutin yang merupakan beban tetap perusahaan. *Leverage* timbul karena perusahaan menggunakan aktiva tetap yang diperoleh melalui hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap perusahaan dengan nilai sesuai persetujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian *leverage* antara lain:

Menurut Kasmir (2017:112) menyatakan *Leverage* ratio adalah sebagai berikut:

“*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang

yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Menurut Irham (2012:127) mendefinisikan rasio *leverage* sebagai berikut:

“Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut”.

Berdasarkan definisi di atas, *leverage* dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang sehingga munculnya biaya bunga. Biaya bunga adalah beban tetap yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Rasio *leverage* dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aktiva. Ukuran ini memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.5.2 Tujuan Rasio *Leverage*

Penggunaan rasio *Leverage* digunakan oleh perusahaan dengan tujuan yang berbeda-beda, setiap perusahaan memiliki cara dalam menggunakan rasio solvabilitas atau *Leverage* ratio. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *Leverage*.

Menurut Kasmir (2013:153) di antaranya:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan rasio *Leverage* yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan kepada kreditur dan menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

2.1.5.3 Manfaat Rasio *Leverage*

Penggunaan *Leverage ratio* memiliki beberapa manfaat menurut Kasmir (2013:154) manfaat *Leverage ratio* adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manfaat rasio *Leverage* yaitu untuk menganalisis posisi perusahaan kepada kreditur dan menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

2.1.5.4 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Rasio *Leverage* atau rasio solvabilitas mengukur sejauh mana sebuah perusahaan didanai oleh hutang. Menurut Kasmir (2017:112) ada 5 (lima) cara penting dalam pengukuran tingkat solvabilitas secara menyeluruh:

1. *Debt to Asset Ratio*
2. *Debt to Equity Ratio*
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*
4. *Times Interest Earned*
5. *Fixed Charge Coverage*

Berdasarkan kelima rasio Profitabilitas di atas, maka akan diuraikan mengenai kelima rasio tersebut, adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio*

Debt to Assets ratio atau *Debt Ratio*, Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva Perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang dengan total aktiva. *Debt to Assets ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

3. Long Term Debt to Equity Ratio

Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara utang jangka Panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jnagka Panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. Times Interest Earned

Times Interest Earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga (J.. Fred Weston). Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio* (menurut James C. van Horne).

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

5. Fixed Charge Coverage

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang mempunyai rasio Times Interest Earned, hanya saja bedanya dalam rasio ini dilakukan, apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*Lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka anjang.

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Debt to Equity Ratio atau sering dikenal DER. Debt to equity ratio karena rasio ini menggambarkan sumber pendanaan perusahaan. Dengan pertimbangan bahwa semakin besar total hutang maka akan mempertinggi risiko perusahaan untuk menghadapi kebangkrutan.

2.1.6 Capital Intensity

2.1.6.1 Definisi Capital Intensity

Menurut Hanum et al (2013) *Capital Intensity* atau rasio intensitas modal adalah:

“*Capital Intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan”.

Capital Intensity merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan.

Keputusan tersebut ditentukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Gula & Mulyani, 2020).

Sedangkan menurut Razif & Vidamaya (2017) *Capital Intensity* didefinisikan sebagai rasio total aset rata rata seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti terhadap penjualan. Perusahaan yang memiliki investasi besar dalam aset tetap yang dapat didepresiasi dapat meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan kredit pajak investasi yang lebih tinggi serta mempercepat penyisihan modal sehingga melaporkan beban pajak yang lebih rendah. Tingginya proporsi aset tetap akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak melalui pengurangan laba akibat tingginya beban depresiasi.

Menurut Agus (2001:120) *Capital Intensity* adalah

“*Capital Intensity Ratio* merupakan rasio antara aset tetap, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti, terhadap penjualan”.

Berdasarkan pengertian diatas bahawah *Capital Intensity* adalah Investasi modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk asset, hal ini merupakan Keputusan keuangan untuk meningkatkan profitabilitas.

2.1.6.2 Metode Pengukuran *Capital Intensity*

Capital Intensity Ratio merupakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkesinambungan dengan pendanaan dalam berbentuk aset tetap atau intensitas modal. Rasio intensitas modal mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan atau *sales*. Oleh karena itu, semakin banyak harta tetap yang perusahaan punya maka semakin besar pula depresiasi sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil dan tarif pajak efektif (Yunie, 2022).

Capital intensity ratio adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Maka perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah Marlinda et al., (2020). Menurut Hanum et al. (2013) *Capital intensity* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut::

$$CIR = \frac{\text{Total Aset tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.7 *Tax Avoidance*

2.1.7.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Pajak adalah penerimaan terbesar negara, sehingga sangat penting bagi pemerintah. Pemerintah selalu memberikan perhatian penuh pada pajak karena tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi negara, meningkatkan layanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan metode *self assessment* yang diterapkan negara Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, hal ini mengakibatkan timbulnya tindakan untuk melakukan penghindaran pajak, karena pada hakikatnya banyak orang yang beranggapan bahwa membayar pajak mengakibatkan penurunan bagi perusahaan.

Menurut Zain (2005:50) yaitu :

“*Tax Avoidance* diartikan sebagai tindakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Penghindaran pajak adalah kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah kas pajak / *cash effective tax rate* terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan (Astuti et al. 2016)

Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. (Pohan, 2016:3)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan manipulasi penghasilan dan meminimalkan beban pajak dalam batas wajar tidak melanggar peraturan.

2.1.7.2 Faktor – Faktor *Tax Avoidance*

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. 82 Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai principal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah di kemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

2.1.7.3 Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut (Arifin, 2020) terdapat beberapa cara dalam mengukur tingkat penghindaran pajak, antara lain:

1. *Effective Tax Rate*

Effective Tax Rate berfungsi sebagai alat untuk beban pajak yang dibayarkan wajib pajak dalam tahun berjalan. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Semakin besar nilai ETR, maka semakin rendah nilai penghindaran pajak yang terjadi. Formula dari ETR antara lain:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate*

Cash Effective Tax Rate merupakan alat ukur yang berfungsi untuk melihat berapa banyak uang yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajaknya. Semakin besar nilai CETR, maka semakin rendah nilai penghindaran pajak yang terjadi. Formula dari CETR antara lain:

$$CETR = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Book-Tax Difference*

Book-Tax Difference merupakan model yang digunakan untuk melihat selisih antara laba yang diakui oleh akuntansi secara umum dan laba secara fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer. Semakin besar nilai BTM, maka semakin tinggi nilai penghindaran pajak yang terjadi. Formula dari BTM antara lain:

$$BT D = \frac{\text{Perbedaan Laba Buku dengan Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Hanlon et al (2010) terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengatur *tax avoidance*

Tabel 2. 1
Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Income Total Tax expense}}{\text{Worldwide Total Pre - Tax Accounting Income}}$	Total expense per dollar of pretax book income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide Current Total Tax expense}}{\text{Worldwide Total Pre - Tax Accounting Income}}$	Current tax expense per dollar of pretax book income
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Income Total Tax expense}}{\text{Worldwide Total Pre - Tax Accounting Income}}$	Cash taxes paid per dollar of pretax bppk income
4.	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Income Total Tax expense}}{\text{Worldwide Total Pre - Tax Accounting Income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years
5.	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory Etr an firm's GAAP ETR

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
6.	DTAX	Error Term from the Following Regression : ETR Differential x Pre-Tax Book Income = a + bx control + e	The unexplained portion of the ETR differential
7.	Total BTD	Pre-Tax Book Income - (((U.S CTE + fgn CTE)/U.S STR) - (NOLt - NOLt-1))	The total difference between book and taxable income
8.	Temporary BTD	Deferred Tax Expense/U.S STR	The total difference between book and taxable income
9.	Abnormal Total BTD	Residual from BTD/TAit = β TAit + β mi + eit	A measure of unexplained total book-tax difference
10.	Unrecognized Tax Benefits	Disclosed Amount Post - FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid uncertain positions
11.	Tax Shelter Activity	Indicator Variable For Firms Accused of Engaging in a Tax Shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
12.	Marginal Tax Rate	Simulated Marginal Tax Rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber : Hanlon & Heitzman (2010)

Dengan berbagai macam pengukuran penghindaran pajak, Pada penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran ialah menggunakan

Cash Effective Tax Rate bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan, Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar Cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Efrida Siboro dan Hendra R Santoso (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance	Variabel independen: Profitabilitas <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Variabel dependen: Tax Avoidance	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance
Jamothon Gultom (2001)	Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance	Variabel independen: profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>likuiditas</i> , Variabel dependen : tax avoidance objek penelitian: Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> , likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Profitabilitas</i> memiliki pengaruh negatif

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			signifikan terhadap penghindaran pajak.
Shinta Budianti dan Khirstina C (2018)	Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)	Variabel independen: <i>Profitabilitas, likuiditas dan capital Intensity</i> Objek penelitian: perusahaan sub sektor manufaktur consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas dan Capital Intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Agnes Yunita Sari (2021)	Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance	Variabel independent : profitabilitas dan leverage dan kepemilikan institusional Variabel dependen : tax avoidance Objek penelitian : 40 perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama tiga periode penelitian, yaitu tahun 2017 – 2019	Leverage dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan
Maria Qibti Mahdiana & Muhammad Nuryatno Amin (2020)	Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance	Variabel independen: profitabilitas, leverage dan sales growth Variabel dependen: Tax avoidance Objek penelitian: Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 sampai dengan 2018	profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan dan sales growth tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Rachmat Sulaeman (2021)	Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan	Variabel Independen : profitabilitas,	Hasil penelitian profitabilitas, dan ukuran

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)	leverage dan ukuran perusahaan Variabel dependen : penghindaran pajak (tax avoidance)	Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) sedangkan leverage berpengaruh negative terhadap Tax Avoidance

Sumber : Data Diolah Penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasar teori dan penelitian terdahulu seperti yang telah dijabarkan diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini :

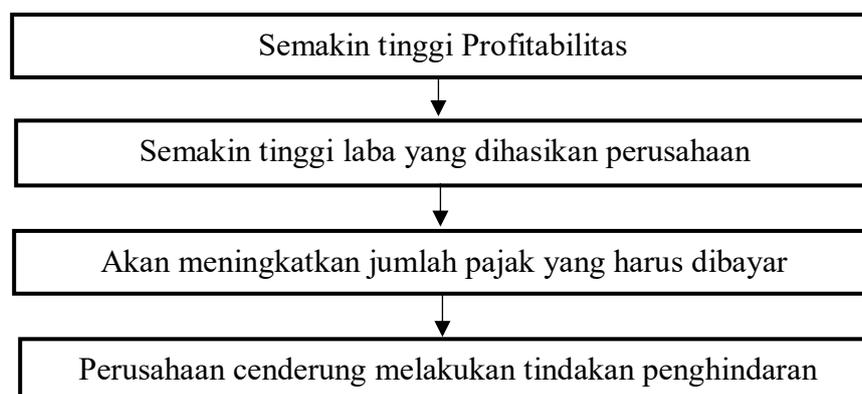
2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Jasmine (2017) Profitabilitas adalah alat pengukur kinerja perusahaan yang menggambarkan keahlian industri untuk mendapatkan keuntungan pada modal saham, aset, dan tingkat penjualan tertentu (Sari et al. 2021)

Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Jika ROA perusahaan tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar juga akan tinggi. Oleh karena itu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. (Prasetya et al. 2022)

Profitabilitas ini semakin tinggi perhitungan hasil rasio *return on asset*, maka akan semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Untuk memaksimalkan nilai *profitabilitas*, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rachmat sulaeman (2021), Maria Q.M & Muhammad Nuryatno A (2020), Fitri S, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

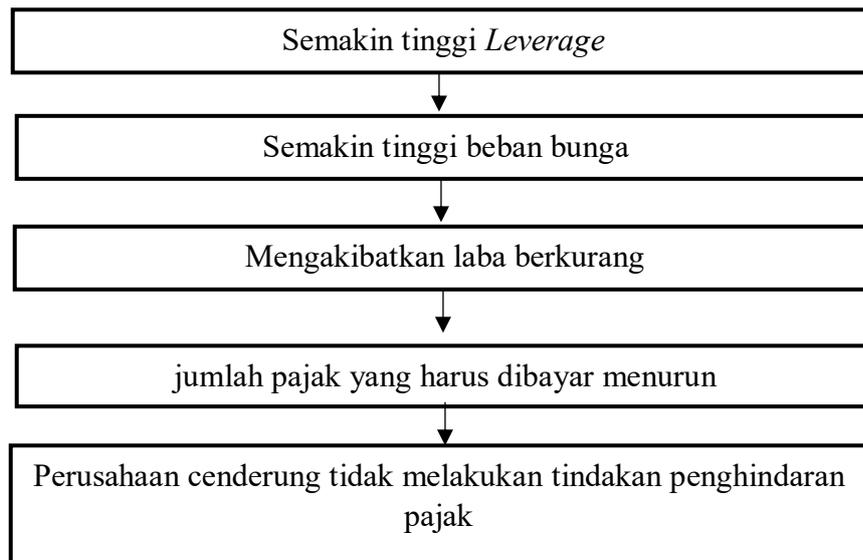
Menurut Fahmi (2012) *leverage* adalah presentase perbandingan total hutang dengan modal perusahaan yang disebut juga dengan *debt to equity ratio* (DER). Semakin besar DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin tinggi dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar biaya perusahaan terhadap pihak luar. Adanya biaya bunga yang semakin meningkat akan memberikan pengaruh berkurangnya laba

sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sehingga pemakaian kredit perusahaan dapat dipakai sebagai penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan pajak, sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pendanaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil, karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah. (Rifai et al. 2019)

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh (Pasaribu et al. 2019) sebagai berikut:

“Rasio leverage yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang, sehingga akan menimbulkan jumlah beban bunga yang tinggi yang dapat mengurangi laba sehingga akan menurunkan beban pajak perusahaan”.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirna Yola Agusti (2014), Agnes yunita Sari (2021), David M. P & Susi D. M (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

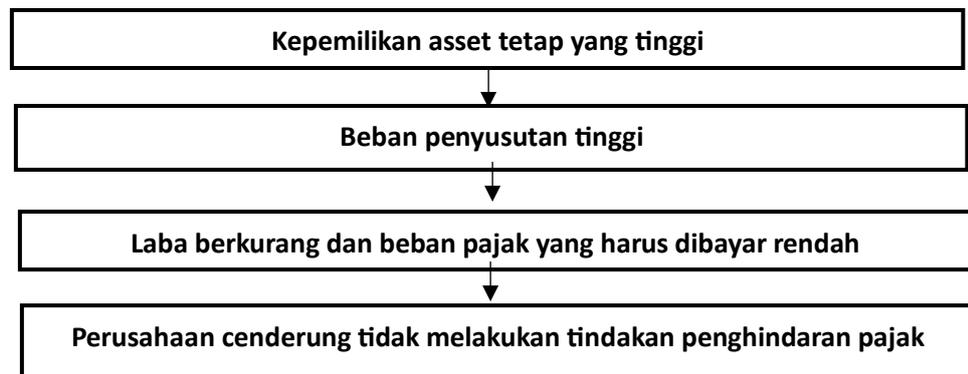


Gambar 2. 2
Bagan Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

2.3.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Biaya penyusutan yang tinggi mengakibatkan laba perusahaan menurun dan beban pajaknya rendah. (Rodiguez dan Arias, 2012 dalam Putri & Lautania, 2016)

Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Rinaldi dkk (2023), Muadz Rizki Muzakki & Darsono (2015), Shinta budianti dan Khirstina (2018) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif.



Gambar 2. 3
Bagan Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity*
terhadap *Tax Avoidance*

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2022 :159) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan Perusahaan memiliki tingkat aset tetap yang besar. Beban penyusutan aset tetap setiap tahun semakin besar. Beban pajak menjadi lebih kecil. Perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Laba menjadi kecil. Manajemen memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

H3: *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*